



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEUTANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Sidang | : 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat Ke | : 10 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 21 April 2020 |
| Waktu | : 13.10 s.d 15.05 WIB |
| Tempat | : Kantor/rumah masing-masing (Rapat Secara Virtual) |
| Ketua Rapat Acara | : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) : Recofusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Melanjutkan Rapat Kerja Tanggal 15 April 2020, Membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI) |
| Hadir | : A. Anggota DPR RI: 40 Dari 55 Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 5 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 4. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 5. Riezky Aprilia, S.H., M.H. 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 2 Dari 8 orang Anggota 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua 2. Alien Mus |

- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
5 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
 2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Sumail Abdullah
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
 5. Dr. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
5 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
 2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 3. H. Charles Meikyansah
 4. Yessy Melania, S.E.
 5. Julie Sutrisno
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
2 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan/Wakil Ketua
 2. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
 4. Muslim, S.Hl., M.M.
 5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
- 8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**
3 dari 4 orang Anggota
 1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 2. Haerudin, S.Ag., M.H.
 3. Slamet Aryadi, S.Psi.
- 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**
2 dari 2 orang Anggota
 1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
 2. Ema Umiyyatul Chusnah
10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (BPPSDMP));

15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan

16. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya,

Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut beserta jajarannya,

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya hari ini kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat dan baik.

Sesuai dengan jadwal acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 27 Maret 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 pada hari ini Selasa, 21 April 2020 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan kelanjutan pada Raker tanggal 15 April 2020 dalam rangka membahas *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Tahun 2020 dalam percepatan penanganan corona virus atau COVID-19.

Sesuai dengan Tatib Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.10 WIB)

Rapat Kerja ini kita mulai pada pukul 13.00 dan akan diakhiri pada pukul 16.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Rapat,
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap agenda rapat,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
5. Kesimpulan rapat,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat Kerja Komisi IV merupakan tindak lanjut dari hasil 2 kali Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 15 April 2020 membahas *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*.

Beberapa hal yang dapat disepakati dalam ... Rapat Kerja dimaksud adalah Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:

1. Memprioritaskan anggaran pada program kebun bibit rakyat, program kebun bibit desa, program pembangunan perhutanan sosial serta program lain yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani hutan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat peduli api, pekerja sampah, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produksi dan manfaat hasil yang dikembangkan.
2. Bersama Badan Restorasi Gambut untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Memprioritaskan anggaran dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan fasilitas pelayanan kesehatan dan penanganan limbah, infeksius akibat kegiatan penanganan *COVID-19*. Disamping terus meningkatkan kegiatan layanan audit internal serta kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pada tanggal 15 April 2020 telah diterbitkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor S302/MK/02/2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga sesuai lampiran surat edaran dimaksud terdapat penyesuaian belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 mengalami penyesuaian atau pengurangan sebesar Rp2.539.710.862.000,00 sehingga menjadi

Rp6.799.614.954.000,00. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat menyampaikan mengenai *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran per Eselon I atas pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp6.799.614.954.000,00.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal diatas tersebut. Dan tolong juga nanti disampaikan anggaran per Eselon I-nya.

Terima kasih.

Silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota, para Anggota yang terhormat Komisi IV DPR RI,
Para Pejabat Eselon I, Pak Wamen, Kepala BRG, dan Dirut PERHUTANI.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas undangan ini. Terima kasih kami senang dapat berjumpa kembali dan terimakasih juga atas segala arahan dan bimbingan untuk penetapan prioritas kerja sebagaimana telah disampaikan diarahkan dan dirumuskan pada Raker tanggal 8 dan tanggal 15.

Bapak Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati,

Pada kesempatan ini sesuai tadi yang disampaikan sebagai arahan dari yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI. Ijinkan kami melaporkan hasil kerja dari arahan, bimbingan dan catatan. Selain tadi sebagaimana disampaikan oleh yang terhormat Ketua Komisi IV berkenaan dengan surat dari Menteri Keuangan. Telah kami sampaikan dokumen tertulis, dan mohon ijin kami melaporkan langsung pada halaman 5 bahwa pagu anggaran KLHK Tahun 2020 pada halaman 5 sebesar Rp9.319.325.819.000,00. Komposisinya terdiri dari biaya operasional senilai 2,8 Triliun, yang terdiri dari: belanja pegawai yang meliputi gaji pegawai, tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai yang ada di Pusat dan di Daerah atau di balai-balai. Selain itu

belanja operasional dan barang yang merupakan operasional kantor, seperti ATK, pengiriman surat dinas, pemeliharaan aset kantor, gedung, kendaraan, peralatan dan sewa langganan daya dan jasa. Ini yang merupakan biaya operasional pegawai dan kantor. Dan selain itu ada belanja yang kita sebut non operasional yang merupakan belanja untuk kegiatan sesuai dengan strategi pencapaian target kinerja. Dan pada umumnya merupakan pelayanan yang bersifat eksternal seperti mohon periksa pada halaman 8.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Kita lihat komposisi ini dalam belanja program atau non operasional pada dasarnya merupakan prioritas nasional dan prioritas bidang. Kalau kita lihat dalam komposisi yang lama itu 4,9 Triliun merupakan mandat prioritas nasional kepada KLHK dan 1,61 Triliun merupakan prioritas bidang kehutanan dan lingkungan yang kita prioritaskan pada rapat-rapat kerja terdahulu dalam rangka APBN 2020 ini Dengan demikian belanja yang mengalami perubahan dari 6,517 Triliun ini.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh yang terhormat Pak Ketua. Jadi selain Perpres yang telah menegaskan penyesuaian untuk senilai 1,58263 Triliun maka kemudian pada tanggal 15 April sore juga keluar dan kami menerima pada tanggal 16 siang, surat Menteri Keuangan yang memerintahkan kepada Kementerian LHK untuk melakukan penyesuaian anggaran sebesar tadi telah disampaikan oleh yang terhormat Ketua yaitu 2,53971 Triliun Rupiah. Jadi dengan demikian sebagaimana laporan kami terdahulu itu kalau kita akan melakukan *exercise* maka pengaturan dilakukan kembali dengan ketentuan yang datang kemudian yaitu kita melakukan *Refocusing* dan realokasi dari 9,319 Triliun dengan penghematan penyesuaian sebesar 2,539 Triliun menjadi 6,779 Triliun.

Pak Ketua dan Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Ijinkan saya melaporkan secara rinci dan nanti mohon diperiksa pada halaman-halaman berikutnya yaitu dihalaman 13 sampai dengan halaman 17 ini merupakan catatan re-orientasi atau *Refocusing* dari kegiatan sebagaimana yang telah kami laporkan terdahulu pada rapat tanggal 8 dan tanggal 15, serta arahan-arahan dari yang terhormat Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati. Jadi pada dasarnya *Refocusing* melakukan penyesuaian disemua jajaran Eselon I yaitu dengan menata ulang mekanisme rapat-rapat, dukungan manajemen, pelayanan, perubahan metode pengawasan, penajaman target-target pengawasan, kemudian penilaian kinerja pelayanan kepada masyarakat ..., termasuk juga pelayanan sertifikasi, dan juga pengendalian DAS dan hutan lindung sebagaimana yang diharapkan pada 2 kali Rapat Kerja kemarin dilakukan dengan efisiensi terus seperti yang lain, belanja meeting, perjalanan, penanaman, dan sebagainya dengan mempertimbangkan situasi COVID yang diproyeksikan kemungkinan sampai dengan bulan Juni akhir.

Demikian juga di konservasi Sumber Daya Alam dilakukan penyesuaian dan penajaman kembali, serta di Planologi, dan juga Litbang mohon periksa pada halaman 15 juga di BP2SDM dan juga di PSKL untuk peningkatan dengan pembinaan kelompok tani dengan pelatihan jarak jauh, ... koordinasi, verifikasi, ini untuk *Refocusing*-nya dan untuk pembinaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya nanti kami juga mohon periksa pada halaman-halaman berikut. Juga demikian di penegakan hukum lingkungan dan kehutanan dan pengendalian perubahan iklim kami tetap mempertahankan penanganan kebakaran hutan dan lahan di GAKKUM kita perkuat dengan sistem jarak jauh.

Kemudian PSLB3 menjadi perhatian khusus kami ... yang berkembang terutama untuk limbah medis, sarana, dan prasarana pelayanan kesehatan limbah infeksius dan juga di restorasi gambut.

Pimpinan, dan Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Selanjutnya mohon periksa pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masyarakat yang kita susun dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian target saja karena pada dasarnya prioritas telah digariskan, telah disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota. Kita cek, mohon periksa di halaman 18 di Sekretariat Jenderal kegiatan dukungan pelayanan manajemen, dan di Inspektorat Jenderal kegiatan-kegiatan dengan metode elektronik dan dengan website media sosial, serta pembinaan akuntabilitas bagi aparat dan pada Direktorat Jenderal PAPL juga hutan produksi di halaman 20, pembelian penambah daya tahan tubuh, peningkatan kapasitas kelembagaan, tetap menjaga PNBPN, sebab PAPL dan PKPL adalah 2 Direktorat Jenderal yang harus dijaga PNBPN-nya sambil tetap kita memperkuat kapasitas kelembagaan ditingkat kesatuan pengelolaan hutan di tingkat tapak Kemudian pemberian insentif kebijakan bagi industri kehutanan, kemudian tetap menjaga para honorer sebagaimana pesan dari Pimpinan dan Anggota. Kemudian bantuan alat-alat produksi bagi KPHP. di PDASHL kita menyesuaikan sebagaimana arahan Rapat Kerja yang lalu bahwa pada kurun waktu katakanlah pertengahan Juli sampai dengan Bulan Oktober, atau pertengahan November akan sulit menanam. Oleh karena itu luas RHL dilakukan dengan pola *agroforestry* dalam bentuk penyiapan bibit. Tadi yang terhormat Pimpinan sudah menegaskan kembali soal kebun bibit desa dan kebun bibit rakyat. Kebun bibit rakyat kita pertahankan 1200 unit, kebun bibit desa terpaksa di *adjust* targetnya. Sementara pemeliharaan tanaman tahun pertama dan tahun kedua itu tetap harus dilakukan.

Kemudian pada Direktorat Jenderal Konservasi ini di halaman 22, ini juga yang sampai dengan sekarang kami justru masih deg-degan ngerjain karena berbagai informasi di Luar Negeri itu satwa-satwa sudah turun dari hutan ke tengah masyarakat. Saya sudah meminta Pak Dirjen Konservasi Pak Wiratno untuk sebagaimana juga arahan dari yang terhormat Anggota dan Pimpinan Komisi IV pada rapat-rapat terdahulu untuk selalu melakukan proteksi dan menjaga kawasan-kawasan yang dipangku. Jadi kita menjaga

jangan sampai ada masalah soal pangan, dan kita harus juga menjaga jangan sampai di hutan tidak ada lagi pangan bagi satwa, dan juga menjaga apabila sudah ada satwa yang turun keluar dari hutan. Disisi lain juga saya sudah minta Pak Dirjen juga untuk mengantisipasi apabila terjadi kemungkinan transfer dan lain-lain. Walaupun secara ilmiah masih belum ditemukan terjadi transfer ... *COVID*. Tetapi dengan perkembangan situasi dan dunia internasional dan berbagai informasi yang ada saya tetap meminta Pak Dirjen untuk terus mengawal bersama Kepala-Kepala Balai di kawasan agar tidak terjadi masalah yang tidak kita inginkan. Disisi lain masyarakat, mitra, polisi hutan, masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan, masyarakat adat, dan sebagainya tetap harus menjadi perhatian. Jadi bagi yang KSDA ini memang sekarang ini bagian yang sedang kami jaga betul, takut ada konsekuensi apa-apa terkait dengan *COVID*.

Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya di Planologi. Planologi ini juga kita jaga di halaman 23 karena salah satu sumber PNPB kita berada di Planologi selain di PHPL dan tentu juga karena kawasan Direktorat Jenderal ini juga mengemban lingkup tugas untuk mengawal dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Jadi untuk segera ditetapkan kawasan hutan bagi keperluan

Pada Litbang sama seperti yang lain. Di Litbang kami jaga karena disini hasil-hasil dari Litbang seperti disinfektan dan lain-lain juga perlu dikembangkan terus bagi kebutuhan masyarakat, juga pembinaan Litbang, juga hasil-hasil studi yang selama ini juga *study*-nya juga sebetulnya dengan cara referensi dan *video conference*. Jadi Litbang ini kenapa nanti terlihat tidak banyak pemotongannya karena Litbang mengemban hal-hal yang menjadi catatan dari Menteri Keuangan yaitu dia mengemban paket Program SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) itu harus dilaksanakan. Kemudian Litbang juga punya Rupiah Murni, pendamping. Jadi dia punya hibah Luar Negeri yang banyak dan perlu disertai dengan Rupiah Pendamping. Jadi Litbang satu-satunya bidang yang nanti penghematannya tidak terlalu menonjol.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya dalam kegiatan refocusing dan realokasi di BPPSDM (Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KLKH). Sama seperti yang lain, tentu penanganan *COVID*, kemudian penyesuaian diklat sebagaimana telah kami laporkan terdahulu dan sebagaimana arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota bahwa kita memberikan dan meminta pendampingan, penyuluh, bagi masyarakat dalam teknis kewirausahaan bagi lembaga-lembaga pelatihan pemegang usaha kehutanan swadaya masyarakat, sambil dilakukan penyesuaian bagi anak-anak sekolah menengah kejuruan kehutanan negeri.

Selanjutnya di PSKL, ini juga kami memperhatikan catatan dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota bahwa refocusing dilakukan dengan penyediaan sarana-prasarana pencegahan tentu saja, kemudian

promosi dan pemasaran produk kelompok kehutanan sosial, penyelenggaraan pelatihan masyarakat jarak jauh, dan banyak untuk pemberian bantuan Pemerintah dalam bentuk paket dari Perhutanan Sosial atau pun dari CSR, dan kegiatan pendidikan dan latihan.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pada dasarnya yang sudah dipersiapkan dan dapat segera dilaksanakan. Sudah ada yang dimulai nanti malam dan kemungkinan untuk besok juga sudah bisa dimulai. Sementara itu. Untuk diklat pendidikan sistem jarak jauh yang akan mengcover didalam catatan BP2SDM bersama-sama dengan PSKL itu akan dilakukan bagi sebanyak jumlah peserta 1588 yang bisa dilakukan mulai tanggal 27 April sampai dengan tanggal 30 April, lalu tanggal 5 sampai dengan tanggal 8. Didalam catatan sudah bisa dimulai di Pematang Siantar, Pekanbaru, Bogor, Kadipaten, Samarinda, Makasar dan Kupang. Dan selanjutnya nanti diatur lagi sampai dengan bulan Mei akan dilatih 530 orang. Eh maaf, 27 April sampai 30 April ya semuanya 1588 orang. Oleh karena itu kami mendorong sebagaimana yang sudah kita bahas pada rapat terdahulu dan kami telah mendapatkan arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota, bahwa didalam pelatihan ini akan ada motivasi yang diberikan oleh yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil yang bersangkutan. Jadi nanti ... akan di rekam. Saya sudah meminta Kepala Balai, dan Pak Dirjen bersama Ka. Humas untuk berinteraksi dengan Tenaga Ahli Sekretariat Komisi IV, dan Tenaga Ahli Anggota untuk segera dilakukan rekaman.

Kemudian di penegakan hukum di Direktorat Jenderal Gakkum juga dalam kaitan kebersamaan dengan masyarakat juga akan dilakukan *e-learning* Jadi pelatihan bagi masyarakat yang bukan aparat dan dia juga petani untuk kesadaran hukum akan sumber daya alam dan lingkungan sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Gakkum juga mengembangkan sistem-sistem jarak jauh untuk pengawasan dengan tetap mengupayakan pencegahan dan pengamanan hutan bagi luasan areal 1.450.000 hektar. Sama seperti yang lain Gakkum juga mempersiapkan langkah-langkah pencegahan pademi *COVID* bagi internal.

Selanjutnya di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Disini yang paling penting kami jaga sesuai arahan dari Pimpinan dan Anggota adalah tentu selain *awariness* atau kewaspadaan terhadap situasi yang ada, dan juga mempelajari perkembangan-perkembangan dilapangan, juga adalah yang penting pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya sekarang sedang meminta Dirjen untuk mengikuti perkembangan situasi dan mempelajari berbagai *discourse* atau diskursus yang berkembang tentang *COVID* dan pengendalian perubahan iklim dan masalah internasional juga sudah mulai berkembang berbagai catatan. Jadi 2 Direktorat Jenderal sekarang yang harus keras berpikir adalah KSDE, dan BPI. Sedangkan yang lain harus keras bekerja. Semuanya memang harus keras bekerja dan berpikir.

Kemudian PSLB3 ini bagian yang paling berat menurut saya untuk konteks *COVID*. Tetapi sudah banyak laporan masuk dan Dirjen sudah mengumpulkan laporan-laporan kekuatan misalnya rumah sakit didalam mengantisipasi limbah medis, laporan lengkapnya sudah ada per daerah. Nanti ... apabila dibutuhkan khusus oleh Bapak-Bapak, Ibu yang terhormat menurut wilayahnya tapi kami masih terus mengikuti perkembangan. Jadi komunikasi dan interaksi dengan Dinas-Dinas LH di Provinsi juga terus berlangsung.

Catatan dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu, dan Bapak Anggota untuk fasilitasi yang medis dan termasuk yang di Sumatera Barat untuk insenelator dan di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu tidak ada perubahan. Jadi kami menjaga catatan-catatan dan arahan dari yang terhormat Bapak/Ibu Anggota pada konteks Dapil masing-masing juga yang di NTB misalnya. Jadi kami perhatikan tentang hal-hal ini.

Dan selanjutnya di PPKL. Ini dipengendalian pencemaran, langkah-langkah yang disesuaikan yang tidak mengalami perubahan adalah pengembangan ... tetapi kita mengurangi beberapa kegiatan didalam volumenya. Tetapi kegiatan-kegiatan penting seperti monitoring kualitas udara, kualitas air, dan lain-lain tetap dilakukan.

Selanjutnya Badan Restorasi Gambut. Ini juga tetap dipertahankan kegiatan-kegiatan penting seperti sekat kanal, kemudian sumber percaharian masyarakat, revegetasi, tapi karena memang adanya penghematan yang cukup besar sampai 2,5 Triliun lebih maka volume disesuaikan.

Ibu dan Bapak Pimpinan, Anggota yang kami hormati,

Catatan rinci dan ringkas untuk refocusing dan realokasi mohon periksa pada halaman 32 sampai dengan 34 sebagaimana tadi telah kami terangkan. Akhirnya kami mohon arahan, dukungan dan persetujuan sehingga beberapa hal bisa sudah kita laksanakan karena pada dasarnya KLHK juga bisa melakukan dukungan-dukkungan regulatif misalnya ketika ada penanaman DAS misalnya relatif harus dikurangi dari dana APBN kita akan cek kapasitas penanaman oleh para pemegang ijin. Demikian pula antar Eselon I Saya sudah minta Pak Sekjen dengan konfigurasi yang ada secara internal bisa lakukan revisi sebagaimana arahan dari Pimpinan dan Anggota yang terhormat dalam konfigurasi ini atau nanti bisa saling mendukung didalam operasional kerjanya. Tetapi ada kebutuhan sebagaimana aturan bahwa harus dilakukan penetapan konfigurasi program untuk kami mohon persetujuan dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu, dan Bapak Anggota dari program-program setelah penghematan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KLHK di Sekretariat Jenderal yaitu. Menjadi Rp490.113.410.000,00.
2. Program pengawasan dan akuntabilitas aparatur bidang LHK sebesar Rp54.613.724.000,00.
3. Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan sebesar Rp235.167.798.000,00.

4. Program pengendalian Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung sebesar Rp1.799.916.214.000,00.
5. Program konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebesar Rp1.659.307.617.000,00.
6. Program planologi dan tata lingkungan sebesar Rp350.007.464.000,00.
7. Program penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp373.643.107.000,00.
8. Program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM sebesar Rp276.286.386.000,00.
9. Program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan sebesar Rp330.949.570.000,00.
10. Program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp313.665.771.000,00.
11. Program pengendalian perubahan iklim sebesar Rp247.988.868.000,-.
12. Program pengelolaan sampah limbah dan B3 sebesar Rp264.468.377.000,00.
13. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sebesar Rp171.242.633.000,00.
14. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp215.244.015.000,00.

Bapak Pimpinan, dan Ibu, dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Demikian yang kami laporkan untuk mohon dukungan, arahan dan persetujuan dari yang terhormat Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota sehingga banyak hal sudah bisa kita segera lakukan bersama-sama. Kami juga berterima kasih atas dukungan untuk bekerja bersama-sama karena mencapai lapangan, mencapai masyarakat secara langsung. Saya kira tidak mudah. Oleh karena itu bekerja bersama-sama yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI dalam bimbingan Pimpinan Komisi IV DPR RI saya kira sangat strategis dan justru ini yang sangat baik.

Terima kasih.

Kurang lebih mohon maaf.

*Wabilluahaufiq Walhidayah,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi IV untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya.

Yang pertama yang mewakili Fraksi PDI-Perjuangan Kapoksinya Pak Sunarna. Silakan.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saya ucapkan selamat siang pada Bu Menteri dan seluruh jajaran Eselon I Kementerian LHK semoga sehat wal'afiat semuanya.

Bu Menteri yang saya hormati, yang sangat kami banggakan.

Saya mengucapkan terima kasih dalam rangka refocusing dari anggaran Kementerian LHK ini. Tentu dari apa yang telah disampaikan Bu Menteri sudah semuanya jelas. Jelas dalam arti, dalam rangka penggunaan anggarannya. Tinggal tentu yang tidak kalah pentingnya adalah titik sasaran. Titik sasaran dalam rangka penggunaan anggaran ini biar tepat sasaran dalam rangka kita mengalami pandemi *COVID* di negara kita yang khususnya tidak hanya negara kita, seluruh bangsa dan negara kita. Fokus anggaran tentu di beberapa negara, tadi Bu Menteri sudah menyampaikan bahwa juga *COVID* ini menyebar ke ada yang ... terkait. Tentu ini penting menjadi perhatian yang lebih awal dan juga kegiatan-kegiatan yang ada anggaran sasaran ini jelas semuanya. Tapi tidak lupa bahwa dalam penanganan *COVID* ini masa lingkungan hidup ini penting dari dampak baik perusahaan-perusahaan yang nantinya pengawasannya jangan sampai kita juga akan melemah dianggap bahwa mereka merasa berkurang.

Di bagian lain Bu Menteri terkait dengan penganggaran ini khususnya direfocusing ini bahwa jangan sampai terlihat bahwa anggaran ini ditempat lain ASN ini banyak yang iuran. Dalam arti mereka membantu baik nominalnya 10.000, 20.000 tapi jangan terlalu kentara bahwa KLHK itu menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan peran *COVID* ini dalam rangka menjaga imun seluruh ASN yang ada di Kementerian tapi juga ... bahwa imun ini penting juga untuk pegawai-pegawai baik pegawai kontrak dan juga penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan tentunya menjadi penting.

Harapan kami Bu Menteri, saran kami bahwa target ini jelas penanganan *COVID* ini. Anggaran yang digunakan mulai kapan progressnya, bisa dilaksanakan kapan dan kapan mulai bisa digunakan. Tentu ini juga. Kecepatan ini penting Bu Menteri. Kecepatan dalam rangka pelaksanaan penggunaan refocusing anggaran ini. Jadi jangan nanti terkesan di masyarakat ini bahwa anggaran, banyak anggaran terus membahas anggaran tapi implementasi dilapangan itu belum terjadi. Kapan terjadinya belum jelas implementasi ini ke lapangan Sesungguhnya lapangan ini basisnya adalah ke masyarakat yang berdampak covid pada kesempatan ... (suara tidak jelas).

Mungkin itu Pak Ketua. Saya terlalu panjang lebar. Saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ketua dan Bu Menteri, dan seluruh jajaran KLHK selalu diberikan sehat wal'afiat jauh dari wabah *COVID* ini.

Sekian.

Terima kasih.

Akhirul kalam *Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Gerindra Ibu Endang. Saya harap teman-teman fokus bicara pada anggaran dulu. Nanti masalah Bansosnya belakangan dijelaskan oleh Bu Menteri atau pun Pak Sekjen.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik.

Assalamu'alaikum.

Pak Ketua dan Ibu Menteri yang saya banggakan.

Selamat hari Kartini Ibu Menteri. Ada wakil perempuan yang menjadi Menteri.

Bu Menteri,

Sebetulnya tadi saya tidak mendengarkan karena terputus aliran listrik di rumah kami mati. Jadi saya sudah *forward* semua usulan-usulan saya ke staffnya Ibu nanti untuk bisa ditindaklanjuti.

Hanya itu mungkin Pak Ketua karena saya tidak fokus mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Ibu Menteri. Hanya saya pesan Bu Menteri, banyak sekali perempuan-perempuan dari petugas-petugas kehutanan. Artinya istri-istrinya itu membuka lapak-lapak yang tidak bisa dijual. Jadi ada cabe ..., ada jahe sehingga kami berusaha untuk mendorong membeli dari teman-teman yang ada disekitarnya kemudian kita bagikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah mudah-mudahan Bu Menteri tetap focus kepada para perempuan yang tersingkirkan karena adanya *COVID-19* ini.

Terima kasih Bu Menteri. Salam hormat yang saya banggakan.

Selamat Hari Kartini.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Golkar Pimpinan yang mulia Pak Dedi Mulyadi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ketua yang baik hati dan mulia kepribadiannya yang saya hormati, Wakil Ketua, para Anggota, Bu Menteri,

Yang pertama saya mohon maaf tidak sampai selesai karena kebetulan Sekretaris saya dulu ketika jabat Bupati barusan kena penyakit jantung dan meninggal. .. sakit, saya harus ke rumah sakit untuk jenazahnya ... (suara tidak jelas).

Kemudian ada 2 hal pokok saja yang disampaikan. Yang pertama, bagi industri yang masih produksi. *COVID* ini bisa jadi dimanfaatkan untuk mereka tidak mengelola limbah secara baik sehingga bisa membuang sembarangan atau tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Saya mohon pengawasan ekstra dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan tentunya pengawasan ekstra di tengah *COVID* ini harus ada juga stimulus yang ekstra bagi para pegawainya agar bisa melaksanakan bekerja dengan baik sekaligus juga perlindungan dirinya dilengkapi dengan baik. Itu yang pertama.

Yang kedua, bahwa *COVID* ini juga berdampak pada ekonomi. Saya khawatir juga pada situasi seperti ini atau nanti setelah ini perambahan hutan akan semakin meningkat, baik di Jawa maupun di luar Jawa karena atas nama desakan kebutuhan ekonomi baik dilaksanakan oleh perorangan, kelompok atau bisa jadi lembaga-lembaga bisnis atau lembaga usaha. Untuk itu juga pengetatan, pengawasan juga harus dilakukan termasuk juga suplemen ekstranya, keamanan, kenyamanan, dan kekuatan pegawainya harus ditingkatkan karena kalau dari sisi alam waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Jakarta misalnya hari ini gunung Pangrangnya jadi kelihatan. Artinya Kementerian KLH sudah dibantu oleh alam untuk menekan aspek polusi udara yang terjadi di Jakarta. Mudah-mudahan corona segera berakhir. Dan anggaran juga saya tidak bisa komentar lebih jauh lagi karena sudah dipotong-dipotong apalagi yang dibicarakan. Sudah sangat minim.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumalam.

Pak Dedi, yang dipotong bukan hanya lembaga atau Kementerian saja, termasuk kita pun dipotong cukup besar sekali.

Yang mewakili PKB, Mbak Luluk saya minta singkat, jelas.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri yang saya hormati,

Mungkin agak ringkih juga ya kalau mau mengkritisi penyesuaian anggaran yang baru karena mengingat pemotongan yang sangat besar. Tapi dalam catatan saya ini saya lihat bahwa penyesuaian yang baru ini Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDHL) itu 1 Triliun dan kemudian KSDAE itu 389,9 Miliar. Yang ini memang menurut saya juga sangat besar meskipun bisa dipahami karena memang PDHL itu anggarannya juga sangat besar 2,7 Triliun. Cuma apakah memang harus pengurangannya itu sampai 1 Triliun. Kemudian yang lain juga. Saya masih ingat ketika itu Ibu Menteri ya pada waktu kita RDP masih sebelum *COVID* menjelaskan juga ke kita bahwa problem yang terkait dengan degradasi lahan dan hutan itu sudah luar biasa besarnya, dan seperti tadi sempat diingatkan juga dalam situasi orang nekat dan lain-lain kira-kira apakah ini juga tidak menjadi bentuk ancaman baru tetapi dengan pengurangan yang sangat besar ini kemudian apa yang akan dikorbankan oleh Ibu Menteri, dengan 1 Triliun itu kan sesuatu. Jadi 1 Triliun itu saya tidak tahu karena memang kita tidak punya satuan tiganya. Jadi program apa sih yang kira-kira sampai dipotong sedemikian besarnya.

Nah yang kedua, yang lebih penting lagi juga karena ada program yang terkait dengan kesejahteraan atau ekonomi di sekitar hutan Ibu. Jadi bagaimana mereka ini justru yang harus dijaga. Karena ketika ada situasi kondisi kita ingatlah masa-masa ketika Tahun'98, bagaimana terjadi penjarahan yang luar biasa maka mereka ini bisa menjadi salah satu benteng kekuatan kita untuk bisa melindungi hutan-hutan kita. Nah oleh karena itu mereka yang lebih dahulu harus diamankan. Program ini kalau kemudian di Dirjennya ya yang dikurangi juga sangat besar apakah juga ini tidak akan membuat kita khawatir. Jadi kalau bisa refocusing meskipun ini agak susah diutak-atiknya intinya tetapi hal-hal yang terkait dengan Tupoksi dari Kementerian LHK ini tidak dikurangnya. Mungkin Ibu yang paling tahu bagaimana yang pasti paling mungkin untuk ini ditempatkan dimana dan seterusnya.

Dan yang ketiga, saya kira saya pada prinsipnya juga menerima banyak. Bukan Bansos ya Pak Ketua tetapi masyarakat di sekitar hutan ini banyak yang mereka sudah menanam empon-empon. Nah tetapi sebagiannya memang mungkin untuk segera didukung agar proses produksi mereka ini bisa berlanjut bukan hanya sekedar menanam tetapi mereka juga bisa menghasilkan sesuatu. Nah menghasilkan ini bukan hanya karena ada kalau sebelumnya itu kan perusahaan yang mengambil tanamannya mereka nah ketika tidak diambil lagi sama mereka sebenarnya mereka itu bisa dan mampu memproduksi sesuatu, apakah itu minuman, apakah jamu-jamu atau bahkan dalam bentuk jadi serbuk ya karena saya juga melihat sendiri. Nah

Cuma mereka sangat-sangat tidak punya kelengkapan produksi itu. Nah mungkin ini yang bisa menjadi pertimbangan.

Nah yang terakhir sekali Pak Ketua mohon maaf, mohon ijin. Mungkin ini seperti tidak ada kaitannya tetapi mungkin ini hanya pengingat kita semua. Karena terus terang saja saya sangat khawatir sekali dan ingin Ibu ini nanti memikirkan karena Panja Omnibus law ini ternyata jalan terus dan saya khawatir sekali bahwa ini dampaknya luar biasa KLHK karena ini seperti mencuri moment disaat semua orang fokus kepada corona tapi ini terus dibicarakan dan saya harap Ibu *say something* terkait ini dan *standing position*-nya Kementerian LHK itu seperti apa karena kita mau jelas kita berada dimana untuk itu, terima kasih ibu.

Salam Sehat.

Terima kasih Bu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu.

Terima kasih Mbak Luluk. Kalau masalah *omnibus law* Mbak Luluk langsung ngomong saja sama Ketua Fraksinya. Ketua Fraksi dan Pimpinan Dewannya saya rasa yang dari PKB sangat setuju hal itu.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Demokrat Ibu Nur'aeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua yang saya hormati beserta sahabat semua, Ibu Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Langsung saja mungkin. Pada prinsipnya mendukung apa yang sudah dilakukan karena pertemuan kita ini sudah ketiga kalinya ya membahas. Dan mudah-mudahan saja apa yang dilakukan refocusing saat ini penambahan yang sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan ini juga pesan saya agar bisa dikelola secara efektif, efisien serta akuntabel dan tepat sasaran. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya besar terhadap program apa yang nanti akan dialokasikan dari kurang lebih 900 Miliaran ini.

Jadi saya tidak akan bertanya lebih jauh. Yang paling penting adalah bagaimana belanja seperti kesehatan, untuk APD, disinfektan, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya. Ini sudah mulai dibuat skemanya dari sisi pendataan walaupun dari lokasi yang akan disalurkan serta dari *quantity* yang akan di fokuskan supaya terukur serta tepat sasaran. Begitu pun dari sisi belanja jaringan pengaman sosial. Itu diserahkanlah dari sisi data dan sebagainya

agar tidak tumpang tindih diserahkan secara teknis. Dan dari sisi anggaran untuk pemberian ekonomi ini juga menjadi penting. Agar dari *refocusing* realokasi ini ada nilai keseimbangan antara kebutuhan internal maupun kebutuhan masyarakat dari sisi pertumbuhan ekonomi agar petani sekitar hutan juga bisa merasakan dampak yang ada dan negara hadir disana.

Yang terakhir saya kira yang harus dipertahankan untuk bisa dilakukan oleh Kementerian LHK sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yaitu kaitan program padat karya, disamping itu juga motor sampah ini sangat dibutuhkan. Disamping itu juga kita ingin padat karya ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Terakhir mengenai sampah infeksius yang ada di rumah sakit. Ini strateginya seperti apa?

KETUA RAPAT:

Oke.

Terima kasih Mbak Nur'aeni.

Selanjutnya mewakili Fraksi NasDem, Ibu Julie.

Silakan.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu Menteri yang saya hormati. Selamat Hari Kartini dari NTT Ibu.

Yang saya dikeadaan pandemi *COVID* ini kita semua sedang penyelamatan nyawa dan juga penyelamatan ekonomi yang harus kita pikirkan. Dan kalau untuk penyelamatan nyawa mungkin banyak sekali sudah merujuk fokus ya kita sekarang ini adalah ke *COVID-19* sehingga mungkin salah satu LHK yang tadi disebut Laboan Bajo tetap. Tapi mungkin Ibu Menteri bisa dipikirkan tempat-tempat yang lain, contohnya kalau di NTT kayak pengolahan limbah B3 itu mungkin di Ende, di Kabupaten Ende juga mungkin bisa dipikirkan karena rumah sakit daerahnya sekarang sudah menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Pengelolaan limbahnya itu yang mungkin perlu kita pikirkan, bukan hanya di Laboan Bajo itu saja.

Dan yang berikut kalau saya karena saya backgroundnya adalah pengusaha makanya saya lebih menanyakan di halaman 31 Nomor 3, bantuan ekonomi produktif untuk masyarakat sekitar kawasan konservasi. Nah itu yang saya mau tanya, bagaimana kalau seandainya kita berdiam diri selama 3 bulan ini supaya kita bisa tetap ekonomi itu tetap bisa kita hidup,

jangan sampai kita mati karena COVID tetapi kita bisa mati karena ekonomi kita tidak berjalan.

Dan yang terakhir mungkin saya lebih bertanya, Bansos ini pasti akan diturunkan banyak Kementerian termasuk LHK. Dan saya bentuknya apa Ibu Menteri karena saya lebih beberapa Menteri yang kemarin juga saya selalu mengutamakan menghimbau untuk Bansosnya itu adalah produk-produk yang isi tasnya itu adalah produknya dari lokalnya sendiri sehingga ada pro kontra ekonomi disitu. Saya rasa kita memang fokus kepada COVID-19 tetapi ekonomi yang setelah dampak covidnya ini supaya bisa tetap berlanjut.

Itu saja dari saya Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PKS Pak Andi Akmal.

Silakan Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ibu Menteri beserta jajaran, Anggota Komisi IV yang rapat virtual.

Pertama saya kira kita sudah rapat 3 kali dengan Menteri LHK dancukup jelas ya. Yang jelas itu sebenarnya Ketua adalah uangnya yang selalu dipotong. Itu sebenarnya tidak jelas. Mudah-mudahan ini sudah pemotongan yang terakhir Bu ya karena kalau tidak jelas juga ya repot kita juga kedepannya berbicara program.

Sebenarnya kalau saya pribadi Bu Menteri sangat menyayangkan ya pemotongan yang kedua karena Kementerian LHK ini sangat urgent untuk masalah hutan dan lingkungan. Disamping itu juga bahwa Kementerian LHK ini adalah Kementerian yang menyumbangkan PNBPN cukup besar bagi negara. Sebagaimana kita tahu bahwa bendahara negara ini Menteri Keuangan ini tidak yakin barangkali bahwa penerimaan negara tidak tercapai sehingga diadakan pemotongan yang kedua.

Nah pertanyaan yang pertama Ibu Menteri, mungkin bisa dijelaskan keyakinan dari Kementerian LHK untuk target penerimaan PDP-nya Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pak Andi tidak kedengaran.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Sudah kedengaran Bu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Sudah.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Baik Bu terima kasih.

Jadi pertanyaan pertama Bu, mengenai masalah target PNBPNya ini bagaimana dengan pemotongan anggaran ini Bu ya. Harapan kita PNBPNya ini bisa tetap tercapai. Itu yang pertama Ibu.

Yang kedua, kemarin kita mendapat berita saya baca juga di Sulawesi Selatan, dimana-mana bahwa Kementerian LHK akan mengucurkan 1 Triliun anggaran untuk masyarakat hutan. Saya kira ini sangat bagus sekali karena ini memberikan stimulus bagi masyarakat yang tinggal dikawasan hutan. Tinggal mungkin nanti dijelaskan seperti apa saja Bu ya walaupun tadi sudah ada bahannya ya, apa yang sudah disampaikan.

Kedengaran Bu?

Baik itu saja mungkin Pak Ketua. Kalau mengenai masalah lingkungan sama kehutanan ya tentu kita berharap bahwa pengawasan ini tidak kendur dengan adanya pengurangan anggaran yang cukup besar.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PAN, Pak Rudi yang dari NTB.

Silakan.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ibu Menteri beserta jajarannya yang saya hormati,
Teman-teman sekalian Komisi IV.

Saya kira saya tidak banyak Bu Menteri karena memang sudah melakukan proses yang cukup lumayan sehingga keluar anggaran yang tadi disampaikan Bu Menteri. Yang paling penting saya mengharapkan agar penyampaiannya tepat sasaran, kemudian yang paling penting adalah waktu. Timingnya ini berjalan terus. Oleh karenanya mungkin setelah diambil keputusan bersama dengan Komisi IV agar ini bisa dieksekusi dilapangan dan yang lain-lainnya.

Dan yang ketiga saya berharap juga mudah-mudahan seperti motor sampah itu bisa dipergunakan atau bisa diadakan dalam rangka revolusi anggaran seperti ini. Kemudian jangan melupakan masyarakat sosial disekitar kehutanan sehingga tetap ikut andil dalam rangka menyelamatkan hutan kita walaupun dalam kondisi rill seperti ini adalah kondisi kita yang sedang menghadapi covid ini.

Kemudian yang terakhir Bu Menteri, seperti yang terdahulu saya mengharapkan agar kita tetap memperhatikan tenaga kerja kita, karyawan kita yaitu KPH yang dilapangan agar tetap diberikan sesuatu yang lebih dalam rangka melaksanakan tugas dalam kondisi ini karena kondisi itu memang berbeda bagi mereka.

Saya kira itu saja mungkin Bu Menteri dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam bekerja.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rudi.

Yang selanjutnya mewakili Fraksi PPP, Mbak Ema.

Silakan.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan, beserta Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang berbahagia.
Yang kami hormati Ibu Menteri beserta jajaran,

Sudah banyak disampaikan oleh teman-teman terkait program-program atau refocusing yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hanya menyampaikan Kementerian LHK dan beserta jajarannya, semua Eselon I selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Kami berharap program-program segera direalisasikan, diimplementasikan kepada masyarakat terutama pada masyarakat terdampak COVID-19 ini. Semoga tepat sasaran, dan masyarakat hari ini sudah menanti berharap ada bantuan-bantuan sosial dari Kementerian terutama LHK yang bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat dikawasan sekitar hutan maupun masyarakat yang membutuhkan.

Itu saja Bu Menteri yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu dan sehat selalu.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Pak Johan Rosihan.

Silakan Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua yang saya hormati,
Ibu Menteri yang terhormat.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu Menteri, Pak Ketua. Pertama, mungkin saran saya kita fokus kepada pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kita dan penanganan terhadap *stakeholder* kehutanan. Karena hal-hal lain sudah banyak dikerjakan oleh Kementerian yang lain, dan dananya juga tidak dipotong-potong. Contoh misalnya kesehatan, ada Kementerian Sosial itu ditambah semua. Hanya Bu Menteri yang dengan mitra kita yang banyak dipotong.

Karenanya Pak Ketua, iijinkan saya menyampaikan fokus ke anggaran. Saya sampaikan catatan, saya menginginkan supaya anggaran di Sekjen itu masih bisa dikurang. Dari 490 Miliar masih bisa dilakukan efisiensi terhadap perubahan mekanisme rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara langsung, baik menjadi secara online, efisien layanan humas dan pengurangan perjalanan dinas.

Yang kedua, anggaran pada Litbang harap dikurangi lagi dari usulan 373 Miliar karena dari semua Badan dan Dirjen, Balitbang paling sedikit penyesuaiannya hanya sekitar 20 Miliar. Dan bisa direlokasi untuk penguatan

kegiatan di Ditjen Perhutanan Sosial untuk memperluas jangkauan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat disekitar hutan.

Yang berikutnya hendaknya dilakukan efisiensi untuk kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM karena perubahan bentuk kegiatan diklat dan pelatihan yang sekarang dilakukan secara online.

Yang berikutnya, anggaran Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam. Hendaknya dilakukan penyesuaian lagi dari usulan pagu 1,6 Triliun dari pagu awal 2 Triliun karena bisa dilakukan efisiensi terhadap kegiatan pendampingan kemitraan konservasi dan pemulihan ekosistem untuk membangun kesadaran masyarakat agar efektif dan kawasan konservasi LHK. Mewaspadaai agar kawasan disekitar konservasi tidak menjadi zona merah dan dari penyebaran wabah *COVID*.

Berikutnya, KLHK mesti memprioritaskan kegiatan bantuan ekonomi produktif untuk masyarakat disekitar kawasan konservasi. Kalau di NTB ini ada kawasan Gunung Tambora, dan Gunung Rinjani.

Yang berikutnya, seperti teman bilang tadi itu sekarang waktu yang tepat untuk kita memberikan bantuan. Salam ke Menteri, ke Presiden, ke Menteri Keuangan, jangan potong-potong lagi Bu Menteri. Sebab kalau potong-potong kita rapat lagi. Tidak lagi bisa kita membagi-bagi bantuan kepada masyarakat. Orang sudah kena *COVID* kita masih saja potong-potong anggaran.

Jadi itu mungkin Pak Ketua, mohon maaf.

*Wabilluhitaufiq Walhidayah,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Johan. Kalau gitu kita potong kambing saja dirumah.

Selanjutnya Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Bu Menteri beserta jajaran, teman-teman Anggota Dewan.

Saya langsung pada fokus masalah anggaran. Perubahan kedua telah dilakukan anggaran KLHK/ ... menjadi 6,7 Triliun. Mengenai pergeseran anggaran kemudian rincian kegiatannya ada pada hati nurani Bu Menteri beserta jajaran mana yang mesti digeser, kegiatannya apa. Yang menjadi persoalan adalah dari perubahan kedua ini bagaimana tadi Bu Menteri sampaikan itu tidak ada rincian penjabaran kegiatan dan jumlah anggarannya. Perlu dipahami anggota dewan ini disamping menjalankan fungsi anggaran juga menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu Pak Ketua, karena pada hari ini juga diminta permohonan persetujuan atas

perubahan anggaran itu ada dalam rekomendasi Kementerian LHK agar melengkapi dengan rincian kegiatannya, termasuk juga jumlah Rupiahnya agar pada saat masyarakat di daerah menanyakan kami bisa menjawab dan juga kami bisa mengawasi untuk apa saja kegiatan ini.

Kemudian yang kedua, dari 14 institusi ternyata di program kedua itu. Itu Balitbang yang tidak mengalami perubahan. Perubahan pertama posisinya 373.643.107, dipertahankan kedua posisinya masih tetap 373.643.107. Didalam penjelasan sebagaimana tadi Ibu Menteri juga sampaikan bahwa Balitbang itu menyatakan bahwa untuk Tahun 2020 tidak akan melakukan penelitian di geser ke Tahun 2021. Kemudian kegiatan-kegiatan dilakukan secara *vidcom* dan virtual. Artinya apa? Memperkuat apa yang tadi disampaikan Pak Johan. Mestinya ada anggaran yang digeser, karena anggarannya itu digeser untuk Tahun 2021. Kemudian dari 14 Eselon semuanya melakukan efisiensi terhadap belanja paket meeting, perjalanan dinas, diklat, pendampingan dan lain sebagainya. Sumber dananya, sumber anggarannya dari belanja operasional dan dari belanja non operasional. Belanja operasional dari program pertama dan kedua baik untuk belanja pegawai, karena itu ... tidak akan berubah tapi itu belanja barang dan yang lainnya mestinya menyesuaikan dengan belanja kegiatan. Artinya apa? Ada ruang untuk bisa digeser pada kegiatan yang sangat utama. 2 kegiatan pokok. Untuk apa? Untuk mencegah pandemi corona dan membuat ekonomi rakyat bangkit agar rakyat juga tentunya bisa makan.

Kemudian yang terakhir Pak Ketua, khusus di Dirjen Pengelolaan Sampah. Penjelasan Ibu Menteri tadi menyebutkan Dirjen Pengendalian Sampah menyediakan fasilitasi pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ini yang menjadi persoalan di daerah Bu Menteri ... objek oleh para oknum, beban Pemerintah Daerah sangat tinggi. Pertanyaan saya, fasilitas ini dialokasikan diberikan kepada siapa? Karena beban rumah sakit sangat berat. Oknum bekerjasama dengan pengelola limbah B3 ini, hanya anggaran daerah, PAD Daerah terkuras untuk membangun biaya masalah ini.

Yang kedua, penanganan sampah terpadu di daerah. Saya kira ini menjadi prioritas karena pelaksanaan anggaran sekarang ini sejak reformasi kita ... konteks politik. Politik Pemerintahan Otonomi Daerah. Saya memperhatikan konsentrasi anggaran semuanya dikelola oleh Pusat padahal Kementerian tidak punya jejaring langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kecuali bidang penyuluhan. Oleh karena ini yang punya rakyat adalah di daerah Kabupaten dan Kota. Kami mendorong untuk sebesar-besarnya dikerjasamakan dialokasikan ke daerah.

Yang terakhir, pencegahan penanganan COVID-19 yang pengadaan motor roda 3 plus tangkinya. Pertanyaannya adalah, mau disalurkan kepada siapa? Kami di daerah ditanya oleh wartawan, kami di daerah ditanya oleh rakyat, ada program apa, ada kegiatan apa. Mana kami menjelaskan ada program kegiatan seperti ini, kemudian rakyat pasti meminta, desa pasti meminta, daerah bisa meminta mohon untuk dirincikan agar kami bisa menjelaskan. Akan lebih baik lagi manakala ini

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sutrisno. Biar nanti dijelaskan sama Ibu Menteri.

Selanjutnya Pak Muslim dari Fraksi Demokrat.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua yang baik hati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ketua dan jajaran Komisi IV,
Bu Menteri beserta jajarannya.

Yang pertama, tentu Bu Menteri saya tidak mengulang kembali berkaitan dengan refocusing anggaran ini.

Yang kedua tentunya kita berharap apa yang disampaikan oleh teman-teman menyangkut berkaitan dengan COVID-19 ini betul-betul segera direalisasikan Bu Menteri. Kenapa saya katakan. Hari ini yang disampaikan oleh Pak Sutrisno ini yang ditunggu oleh masyarakat. Tentu kami di Dapil juga ini bertanya-tanya, apa, kapan dilaksanakan?

Yang kedua, saya melihat di BPPSDM. Disini ada banyak sekali program diklat secara online. Tentu dalam hal ini juga kami di Dapil juga dikomunikasikan ke teman-teman ini harus segera dilaksanakan. Kenapa? Karena target dari Kementerian LHK adalah dengan refocusing adalah dalam rangka COVID-19. Untuk itu kami mohon dari semua relokasi anggaran ini untuk covid-19 untuk dapat segera dilaksanakan dengan cepat.

Terakhir mungkin, kepada Wiratno selaku Dirjen KSDAE. Kami mohon, selama ini kami terima kasih juga sudah disupport Bu Menteri berkaitan dengan penanganan gajah kemarin. Tentu dalam hal ini kita harapkan program-program seperti ini harus terus dilakukan. Kenapa? Mengingat kondisi saat ini berkaitan dengan penanganan berbagai macam wisata-wisata khususnya berkaitan dengan marga satwa ini harus betul-betul dimaksimalkan.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Ansilema dari PDI-Perjuangan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Selamat siang Bapak/Ibu Anggota Komisi IV, dan Yang terhormat Ibu Menteri dan jajarannya.

Saya ingin memulai dengan satu kesimpulan. Setelah membaca materi presentasi KLHK. Bu, belum ada rincian anggaran yang detail Bu. Karena itu kita belum bisa mengukur atau pun menakar apakah realokasi anggaran dan refocusing kegiatan ini memang sudah memenuhi prinsip prioritas dan tepat sasaran. Nah evaluasi dan pengawasan ini tentu perlu Bu. Karena itu kami minta sesuatu yang lebih detail terkait dengan anggaran dan refocusing kegiatan ini.

Yang kedua, saya ingin tegaskan kembali kepentingan masyarakat yang hidup didalam hutan dan disekitar hutan Bu, baik kepentingan kesejahteraan mereka sehingga kemudian mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Kita tahu bahwa selama ini mereka menggantungkan hidup mereka dari kehutanan.

Yang ketiga, kepentingan para pengabdian sektor kehutanan Bu. Nah ini jangan sampai dilupakan Bu. Nah beberapa waktu lalu kalau kita bicara itu ancaman terhadap sektor kehutanan ini semakin besar Bu, ada *illegal logging*, ada juga perburuan satwa-satwa langka dan liar. Nah ini jangan sampai petugas patroli kehutanan ini dikurangi Bu. Ini harus semakin diperketat. Kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mereka ketat menjaga *illegal fishing*. Nah mestinya *illegal logging* dan kejahatan-kejahatan disektor kehutanan ini juga semakin diperkuat.

Selanjutnya, saya juga ingin mempertanyakan Bu terkait dengan pemberdayaan kelompok perhutanan sosial Bu. Saya belum melihat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang secara konkrit terhadap kelompok usaha perhutanan sosial ini. Padahal kita tahu mereka ini punya peran yang sangat penting Bu.

Yang berikut saya juga mau menyoroti diperhutanan sosial dan kemitraan lingkungan itu Bu. Disitu disebutkan KLHK hanya memberikan bantuan berupa promosi dan distribusi. Pertanyaan saya, lalu hasil-hasil hutan di Perhutanan sosial ini siapa yang beli Bu. Apakah mungkin misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga bisa membeli hasil-hasi petani hutan.

Yang terakhir Bu, saya ingin menyebutkan bahwa di NTT itu sebagian besar hutan konservasi Bu. Tolong ini tetap diperkuat. Taman nasional komodo itu ada banyak laut, ada banyak hutan, tolong lagi diperhatikan Bu.

Dan terakhir saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wiratno Dirjen. Saya dengar pembangunan resort dan hotel di 3 wilayah. Di wilayah konservasi dan pulau di Taman Nasional Komodo itu sekarang dihentikan. Mantap Bu.

Nah itu yang bisa saya sampaikan.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Profesor Doktor Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, Anggota dan Bu Menteri bersama dengan jajarannya.

Saya ingin menyampaikan perasaan saya Bu ya. Saya menyayangkan adanya pemotongan anggaran di Kementerian dari 9 koma sekian Triliun menjadi 6,5 Triliun. Ini implikasinya itu adalah terhadap, bisa menjadi terhambatnya pembangunan sektor kehutanan dan lingkungan, dan juga bisa berdampak kepada ... untuk memberantas kemiskinan di daerah sekitar hutan dan masyarakat didalam hutan. Ini menjadi catatan saya buat Bu Menteri. Ini Ibu Menteri harus membuat strategi yang tepat, bagaimana dengan keterbatasan dana ini Bu Menteri bisa menyesuaikan *roadmap* yang baru untuk memberantas kemiskinan.

Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa sekarang ini di beberapa wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota itu sudah melakukan *lockdown* atau PSBB. Nah ini juga ... kemungkinan peluang keamanan akan makin longgar karena disini akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa terkait dengan terbebaskannya 35.000 tahanan. Ini belum bisa terpantau secara pasti. Nah ini akan ada peluang terjadinya kejahatan di sektor kehutanan. Nah ini Ibu Menteri harus mencermati supaya kita tidak terjadi *illegal logging*.

Kemudian terkait dengan soal di Sumatera Barat Ibu Menteri. Itu terjadi longsor. Ada di daerah Kabupaten Solok, ada di daerah Solok Selatan dan itu sangat memprihatinkan. Saya minta supaya Kementerian betul-betul mencermati daerah ini. Karena hampir setiap tahun daerah ini selalu ada bencana longsor atau pun juga banjir bandang dan lain sebagainya. Ini akibat dari praktek-praktek mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan disana. Saya minta Bu Menteri betul-betul melakukan pengawasan dan penegakan hukum di daerah ini.

Kemudian Bu Menteri, saya minta juga terkait dengan soal program yang berbasis masyarakat ini. Ini segera direalisasikan karena memang kita sekarang ini sudah di beberapa tempat itu, masyarakat itu betul-betul sudah kehilangan mata pencaharian. Dan hampir-hampir di beberapa tempat itu ada yang tidak makan sampai berhari-hari untuk sesuap nasinya. Nah ini Bu Menteri untuk segera meresmikan.

Kemudian yang terakhir Bu Menteri, saya minta supaya program pengolahan limbah sampah B3 di Sumatera Barat khususnya di Padang itu

segera direalisasikan karena ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Karena Sumatera Barat sekarang ini sudah masuk PSBB. Oleh karena itu kebutuhan ini sangat mendesak segera diresmikan termasuk juga transportasi pengolahan sampah yang lainnya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Ketua.

Saya masih memperhatikan. Monggo yang lain duluan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Slamet dari Fraksi PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pak Ketua, dan Wakil Ketua dan seluruh rekan-rekan Anggota yang saya hormati.

Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Bu Menteri. Yang pertama, terkait dengan beredarnya undangan kita untuk. Kan ada segera acara *e-learning*, kita diminta membuat sambutan. Nah saya ingin mempertanyakan itu, pesertanya itu apakah sudah dari ditentukan oleh KLHK atau melibatkan Anggota dari Dapil masing-masing. Karena kita sudah diminta untuk membuat kata sambutan tetapi kita belum jelas nih pesertanya apakah sudah ada atau kita yang memang akan merekrut. Itu yang pertama Bu Menteri.

Yang kedua, terkait dengan perhutanan sosial. Saya berinteraksi dengan mahasiswa yang juga punya idealisme terutama mahasiswa fakultas pertanian Ibu. Artinya dia punya idealisme untuk kembali menerapkan ilmunya, tidak ingin menjadi pekerja kantoran atau pekerja diseseorang tapi ingin menjadi petani. Cuma ada kendala tentunya ... kita juga sudah paham.

... (suara tidak jelas) mahasiswa-mahasiswa pertanian yang memang terus kemudian kita bimbing mereka sehingga kedepan masalah pertanian yang akan mengikuti perkembangan jaman ini akan terjawab. Karena ... (suara tidak jelas atau terekam).

KETUA RAPAT:

Pak Slamet, mungkin signalnya kurang bagus. Saya stop dulu. Saya kasih Mbak Riezky Aprilia, setelah itu kembali lagi ke Pak Slamet.

Silakan Mbak Riezky.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat Hari Kartini buat para perempuan-perempuan hebat di Indonesia.

Selamat Hari Kartini Ibu Menteri.

Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi atas langkah yang sudah Ibu ambil hari ini terkait dengan realokasi dengan refocusing. Saya apresiasi dengan segala keterbatasan saya yakin KLHK hari ini mampu memaksimalkan segala sumber daya yang ada hari ini di KLHK.

Dan kedua, seperti tadi teman-teman sampaikan bahwa saya berharap tidak ada lagi pemotongan-pemotongan dari Kementerian Keuangan terkait mitra-mitra ini. Karena apa? Saya sampaikan kemarin juga kepada Kementerian Pertanian bahwa hari ini terkait dengan pangan itu adalah ujung tombak hari ini apabila situasi apa pun terburuk terjadi di Indonesia kedepannya nanti. Jadi saya mohon Ibu Menteri tolong jelaskan sejelasa-jelasnya kenapa mungkin harus dijelaskan secara baik dan konkrit terkait hal tersebut. Dan sekali lagi kami menunggu aksi nyata dari KLHK untuk para masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini kedepannya.

Sekian dari saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Tumben benar.

Selanjutnya kembali ke Pak Slamet.

Pak Slamet signalnya sudah bagus belum?

Lanjut.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Melanjutkan tadi yang pertama. Yang kedua terkait dengan perhutanan sosial. Jadi ketika ... perhutanan sosial bisa memberikan ruang untuk mahasiswa yang memang punya idealisme untuk kembali kepada pertanian. Ini mungkin akan menjawab bagaimana kemudian kualitas SDM Pertanian kita yang hari ini memang masih jauh dibawah sehingga tugas-tugas dari Dekan, dari Kementerian sebenarnya lebih ringan. Itu yang kedua.

Yang ketiga Bu Menteri, terakhir. Kalau tidak salah mohon diluruskan kalau data saya salah. Ada 266 titik kawasan konservasi yang ditutup. Ini mohon dikoreksi barangkali salah. Tetapi bukan dititik itunya yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimana terkait dengan persediaan terutama adalah pakan satwanya termasuk beberapa kebun binatang akan ditutup itu. Dengan anggaran yang dipotong itu bagaimana kemudian nanti menyiapkan itu strateginya termasuk juga pelaku-pelaku ... kawasan itu masih terdampak

Itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Menteri, Bapak Pimpinan dan juga seluruh rekan-rekan semuanya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri LHK untuk menyampaikan jawabannya termasuk juga tadi yang ditanyakan perihal sambutan, perihal Bansos, perihal yang ditanyakan oleh Anggota Dewan yang kenapa yang di refocusing realokasi sedikit tapi minta tolong singkat, jelas dan padat.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Pak Ketua yang kami hormati,
Terima kasih Pimpinan, dan
Ibu dan Anggota yang kami hormati.

Terima kasih atas berbagai catatan. Saya ingin menegaskan bahwa segera ini disetujui maka hari ini juga kita selesaikan administrasi di Menteri

Keuangan. Seluruh proses administrasi, revisi, dan kerja-kerja lapangan kita persiapkan, dan beberapa kegiatan sudah ada yang bisa dilakukan dan bisa mulai start besok. Saya mengharapkan mohon jangan ada keraguan kepada Kementerian ini untuk bekerja sebaik-baiknya karena saya sangat menyadari dan sangat memahami harapan dari Ibu dan Bapak sekalian yang juga sebetulnya harapan dan keprihatinan saya. Jadi Pak Ketua, mohon ijin melalui yang terhormat Ketua, Pimpinan kami mengharapkan kepercayaan yang utuh dari yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Dewan bahwa ini akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan bahwa penyelesaian telah kita coba lakukan dengan sebaik-baiknya.

Beberapa alasan tadi sudah kami sampaikan, seperti yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota yang mempertanyakan mengapa misalnya Litbang kecil? Karena dia menanggung SBSN, menanggung juga Rupiah pendamping hibah Luar Negeri sehingga memang tidak bisa diapa-apain. Jadi beberapa rincian dan anggaran saya kira, karena mungkin sulit untuk dilakukan RDP Pak Ketua. Nanti secara teknis bisa disampaikan melalui, bagi yang menanyakan bisa disampaikan melalui Sekretariat Komisi. Oleh karena itu saya kira beberapa hal menjadi perhatian dan prioritas kami dari berbagai catatan, apakah yang di NTT, NTB, Sumatera Barat. Memang banjir, longsor dan lain-lain juga menjadi catatan kami. Saya juga mohon ijin menjelaskan sedikit bahwa sudah sama-sama dipahami para Rapat Kerja yang lalu bahwa penanaman kalau kita start dari Bulan Juli dan Agustus katakan itu sangat sulit sehingga penanaman tidak bisa dilakukan. Itu sebabnya maka dana di PDASHL diambil cukup besar.

Kemudian kami perhatikan betul masalah pengawasan tadi juga keamanan dari kawasan. Dan tentang penanganan limbah medis saya kira sudah ada di halaman 29. Saya perhatikan berbagai prioritas tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Anggota.

Kemudian tentang KPH. Dukungan kepada KPH juga didalam catatan di lampiran kami juga ada bahwa kepada KPH dilakukan kerjasama untuk sarana ekonomi produktif. Jadi itu juga dilakukan. Nanti bagaimana rinciannya saya kira melalui Sekretariat bisa berapa unit, berapa duitnya, akan diatur di lokasi mana, dan sebagainya. Kita itu nanti bisa menurut prioritas dan catatan dari yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota.

Saya mohon ijin Pak Ketua, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Bahwa peserta *e-learning* adalah para pendamping atau penyuluh LSM pendamping, plus dan 5 petani dari pemegang ijin hutan sosial di daerah tersebut. Jadi pada tahap 1 itu 1588 orang mulai 27 sampai 30 April. Dan tahap 2-nya 1420 orang mulai Bulan Juni. Saya kira kalau nama-namanya tentu akan ada kaitan nanti Pak Dirjen ya dengan kelompok hutan sosial yang ada di lokasi tersebut juga dalam hal dibutuhkan. Saya kira Pak Dirjen juga bisa memberikan daftar dari nama-nama Perhutanan Sosial tersebut atau kelompok hutan sosial tersebut.

Kemudian saya dengan gembira menyampaikan dan berterima kasih atas diangkatnya persoalan apakah mahasiswa yang lulus mendapatkan dukungan kawasan hutan dan sebagainya untuk pekerjaan sebagai hutan sosial dan sebagainya. Saya kira jawabannya bisa Bapak. Secara teknis aturannya memungkinkan bahwa yang namanya Tora juga boleh untuk mahasiswa yang bisa mengolah secara profesional untuk reforma agraria apalagi untuk Perhutanan Sosial.

Jadi Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat,

Terima kasih atas seluruh catatan. Menjadi perhatian kami Pak Ketua dan saya juga sebetulnya berharap secepat-cepatnya kita bisa melaksanakan ini. Dan mari sepanjang waktu masih sama-sama bisa terus diikuti dan bisa dilakukan juga koreksi-koreksi didalam perjalanannya. Tetapi Bapak/Ibu yang terhormat yakinlah bahwa kami telah berusaha mencoba untuk yang terbaik yang bisa kita lakukan.

Saya juga ... berkenan, komunikasi dari Tenaga Ahli Bapak/Ibu yang terhormat untuk percepatan realisasi-realisisi dimaksud.

Saya kira itu Ibu dan Bapak pimpinan yang kami hormati. Kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi IV,
Ibu Menteri. (sebentar Pak Ketua ini masih ke belakang)

Ada saran tambahan? Kalau sudah cukup biar langsung disimpulkan oleh Pak Ketua.

Silakan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf tadi ke toilet sebentar.

Jadi silakan dibuka saja Mana, sudah rancangannya?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Mohon ijin Ketua, tadi kami sudah melaporkan.

KETUA RAPAT:

Yang masalah katanya ada Bansos itu yang dari pengusaha, bagaimana itu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pak Ketua, mohon ijin apakah boleh sebagai Ketua Timnya Pak Sekjen yang melanjutkan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan dijelaskan supaya Anggotanya tahu.

Silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih Ibu Menteri.

Yang terhormat Ketua Komisi IV DPR RI, Pimpinan Komisi IV DPR, dan Anggota Komisi IV DPR,

Atas ijin Ibu Menteri kami laporkan sebagai tindak lanjut Raker-Raker sebelumnya terkait bantuan CSR yang kita kelola dari fasilitasi asosiasi dibidang kehutanan HPAI, dan juga GAPPI yang berkaitan dengan perkebunan. Sampai hari ini syukur Alhamdulillah ... terus bertambah atau mengalir, dan memang dalam 1 minggu ini data-datanya sudah report hari ini baik dari GAPPI maupun HPAI. Alhamdulillah untuk APD ini sudah ada kurang lebih hampir 100.000 masker yang bagian terbesar dari APD ini disamping juga alat-alat atau pun perlengkapan yang terkait dengan kebutuhan rumah sakit. Dan inilah yang menjadi prioritas yang bisa untuk dialokasikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang terhormat. Dan juga kami fasilitasi dari KLHK dari produk-produk petani yang dibeli juga oleh Dirjen PSKL. Ini kami satukan nantinya dengan CSR ini sehingga nantinya akan ada 2 paket yaitu kontribusi CSR dalam bentuk APD (Alat Pelindung Diri) khususnya masker, juga ada sarung tangan, dan juga tambah lagi Terima kasih Bu Menteri diingatkan.

Juga ada paket sembako yang juga terus mengalir. Nah isinya itu ada beras, ada gula, dan juga minyak goreng. Ini yang sedang kami siapkan, terus menerus bertambah.

Jadi kalau kita lihat dari CSR itu selain APD juga ada paket sembako dan juga ada produk-produk fasilitasi swasta dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan. Dari kita Dirjen PSKL tadi Bapak/Ibu juga ada yang menanyakan bahwa terus memang Dirjen PSKL membeli produk-produk dari toko usaha perhutanan sosial.

Demikian juga Perum PERHUTANI juga kita segerakan untuk membeli produk-produk di Jawa. Sehingga dari seluruh bantuan-bantuan maupun dari kita keluarkan dari APBN itu akan jadi satu kesatuan yang akan kami segera distribusikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR. Khusus untuk Jabodetabek yang memang dekat dengan Jakarta kami pun didalam distribusinya di Pusat Kantor Manggala maupun di Kebon Salak nanti kami siapkan paketnya. Untuk yang berada di Luar Jawa atau di Jawa yang agak jauh, tapi khususnya di luar Jawa, Jabodetabek dan di luar Jabodetabek dan diluar Jawa, kami sudah sangat berkoordinasi dengan HPAI dan GAPPI bahwa bantuan-bantuan ini nanti akan dikoordinasikan dengan Komda-Komda Provinsi sehingga sekaligus dengan komunikasi Bapak/Ibu yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

KETUA RAPAT:

Dengan siapa tadi Pak Sekjen?

SEKJEN KLHK:

Ijin Pak.

KETUA RAPAT:

Dengan siapa tadi Provinsinya?

SEKJEN KLHK:

Komisariat Daerah Pak, HPAI maupun GAPPI.

KETUA RAPAT:

Kenapa tidak dikantor Bappeda saja? Kan setiap Provinsi punya Kantor Bappeda.

SEKJEN KLHK:

Yang mengkoordinir memang bantuan itu di Komda-Komda, nanti akan mitrakan di UPT kita Pak. Di kumpulkan di UPT kita. UPT kita nanti yang koordinasi dengan Setkom beserta Tenaga Ahli Bapak/Ibu, dan akhirnya nanti distribusinya tetap dari KLHK melalui koordinator UPT atau UPT, seperti halnya di Jakarta ini Bapak.

Jadi kami mohon nanti dengan Sekretariat Komisi atau Bapak/Ibu yang memang sudah siap kami akan segera memulai Insha Allah nanti malam

sudah ada juga dari Pak Jomas Mojokerto. Itu juga sudah kita mulai siapkan Bapak/Ibu yang terhormat. Besok juga berjalan. Dan akhirnya nanti 1 paket itu terdiri dari CSR ada APD, dan juga sembako dan juga produk-produk kemitraan ditambah dari KLHK untuk produk PSKL yang membeli produk dari masyarakat. Itu nanti kita kemas menjadi satu kesatuan, dan akan berjalan terus diseluruh Indonesia khususnya di Dapil-Dapil Bapak/Ibu yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen satu lagi yang akan saya tanyakan, 1 Anggota itu menyalurkan berapa paket. Kan Mbak Ita sedang duka cita. Ayahnya meninggal. Jadi Beliau belum melaporkan ke kami. Dan kita juga tidak enak mengganggunya. Kira-kira 1 Anggota menyalurkan berapa paket?

SEKJEN KLHK:

Kami koordinasikan dulu Bapak untuk jumlah-jumlahnya, APD khususnya. Dan tentunya arahnya dari Bapak/Ibu yang terhormat kan ke rumah sakit ke rumah sakit kalau untuk APD, itu juga termasuk sarung tangan dan juga termasuk paket sembako. Jadi sembako itu untuk masyarakat Bapak. Kalau 1 paket besar isinya ya bisa APD, bisa sembako, dan bantuan ekonomi produktif produk-produk. Ini kami sedang mengatur dulu mohon ijin Bapak jumlah-jumlahnya.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, saran saya selaku Pimpinan Komisi IV lebih baik dirumuskan dulu yang matang, yang jelas baru nanti ya seminggu lagi pun tidak apa-apa. Kan minggu depan baru jelang puasa. Daripada cepat-cepat, nanti penyalurannya juga tidak tepat, jumlahnya juga kita tidak tahu. Tadi Pak Sekjen mengatakan jumlah masker berapa, 100.000?

SEKJEN KLHK:

Sementara Pak. Itu akan bertambah terus memang nantinya ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Ya kalau masker 100.000 mah pelit sekali itu pengusahanya, mau untung saja itu. Kalau 100.000 itu kalau kali 3500 Cuma 350 Juta. Saya saja menyalurkan untuk Lampung saja sudah hampir 70.000 saya pribadi. Tolong kalau bisa dilebihkan lagi masker itu, karena umumnya di daerah itu masker kan mahal dan susah dicari Pak Sekjen. Jadi kalau bisa bilang pengusaha, ketuk hatinya supaya bantu lebihlah. Itu ya Pak Sekjen ya.

SEKJEN KLHK:

Siap Bapak.

KETUA RAPAT:

Jadi jangan diputuskan dulu, diatur dulu sedemikian rupa jadi mantap sekalian. Ya Pak Sekjen ya.

Teman-teman,

Saya minta ijin untuk menyampaikan kesimpulan keputusan Rapat ini yang mana nanti atas permintaan Anggota Komisi IV tadi perihal rinciannya pasti akan segera diserahkan. Saya mulai pembacaannya:

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat menyangkan adanya penyesuaian pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.539.710.862.000,-.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penyesuaian pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 mengalami penyesuaian sebesar Rp2.539.710.862.000,00. Sehingga menjadi Rp6.779.614.954.000,00 sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor: F302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal semula Rp592.759.666.000,00 menjadi sebesar Rp490.113.410.000,00.
 - b. Inspektorat Jenderal semula sebesar Rp86.966.609.000,00 menjadi Rp54.613.725.004.000,00.
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari semula Rp301.754.834.000,00 menjadi sebesar Rp235.167.790.000,00.
 - d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung semula Rp2.799.916.214.000,00 menjadi sebesar Rp1.799.916.214.000,00.
 - e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem semula Rp2.049.226.996.000,00 menjadi Rp1.659.307.617.000,00.

- f. Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan semula sebesar Rp480.427.460.000,00 menjadi Rp350.007.464.000,00.
- g. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi sebesar Rp393.833.245.000,00 menjadi sebesar Rp373.643.107.000,00.
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula Rp340.386.089.000,00 menjadi sebesar Rp276.286.386.000,00.
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan semula sebesar Rp458.679.200.000,00 menjadi sebesar Rp330.949.570.000,00.
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan semula sebesar Rp468.790.771.000,00 menjadi Rp313.665.771.000,00.
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim semula sebesar Rp313.272.831.000,00 menjadi sebesar Rp247.988.868.000,00.
- l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya semula Rp361.844.139.000,00 menjadi sebesar Rp261.468.377.000,00.
- m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan semula Rp357.472.233.000,00 menjadi sebesar Rp171.242.633.000,00.
- n. Badan Restorasi Gambut semula Rp312.995.525.000,00 menjadi sebesar Rp215.244.015.000,00.

Anggota, apakah dapat disetujui?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

- 3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyusun rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per Eselon I, kemudian menyusun rencana target penerima serta jadwal pelaksanaan penyaluran Bansos. Untuk selanjutnya melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ketua, mohon ijin. Ini maksudnya nanti disampaikan lewat Sekretariat, bukan di Rapat Kerja.

KETUA RAPAT:

Ya segera mungkin, supaya kami fungsi pengawasannya tetap berjalan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan program pembangunan ekonomi produktif bagi masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan.

Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih atas tanggapannya, dan draft kesimpulan sudah disetujui.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Kerja ini dipersilakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja ini.

Silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas dukungan dan kepercayaan kepada Pemerintah, kepada KLHK dan kami akan menindaklanjuti sebagaimana tadi yang disampaikan menurut kesimpulan maupun catatan-catatan dari Anggota, dan kami akan melaksanakan untuk tepat sasaran dan sesuai dengan jadwal yang kita harapkan.

Terima kasih Ibu dan Bapak Anggota.

Terima kasih yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.05 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001

